



PEMKO MEDAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021

**SEKRETARIAT
DPRD KOTA MEDAN**

Jl. Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan
Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan atas ijinNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021 ini selesai disusun. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kota Medan atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2016-2021 serta dokumen Renja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021.

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, sehingga dalam perumusan kebijakan dan program kedepannya dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Selain itu, melalui Laporan Kinerja ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021 ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk kinerja yang lebih baik lagi dimasa mendatang.

SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN,



MUHAMMAD ALI SIPAHUTAR, S.S.T.P., M.A.P.
PEMBINA
NIP. 197903171999121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum OPD : Sekretariat DPRD Kota Medan	1
C. Tugas, Fungsi dan Peran Strategis Sekretariat DPRD	2
D. Struktur Organisasi dan Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur	3
E. Isu-Isu Strategis dan Peran Sekretariat DPRD Kota Medan ..	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021	10
A. Rencana Strategis Sekretariat DPRD 2021-2026	10
Visi dan Misi	
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021-2026	
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan 2021-2026	
B. Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan Tahun 2021	28
C. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2021	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Pengukuran Capaian Kinerja	35
1. Pengukuran Capaian Kinerja pada Sasaran Sasaran Strategis	36
2. Pengukuran Capaian Kinerja pada Program	37
B. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan	38
C. Akuntabilitas Keuangan : Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2021	57
D. Evaluasi Pencapaian Kinerja	58
E. Permasalahan dan Solusi	60
1. Permasalahan	60
2. Solusi	61
BAB IV PENUTUP	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan pertanggungjawaban dan merupakan suatu kewajiban untuk disusun oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan adalah perwujudan kewajiban Sekretariat DPRD Kota Medan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Sekretariat DPRD kota Medan Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Program dan kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam melayani dan memberi dukungan administratif dan keuangan bagi terlaksananya tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Dalam laporan ini juga dimuat uraian tentang kinerja DPRD Kota Medan, hal ini untuk lebih menjelaskan peran penting Sekretariat DPRD dalam kaitan dengan capaian kinerja DPRD Kota Medan. Tugas Sekretariat DPRD adalah melayani dan memberi dukungan administratif, pengelolaan keuangan, dan sarana dan prasarana bagi terlaksananya tugas, program dan kegiatan DPRD Kota Medan.

Penyusunan laporan ini selain untuk menginformasikan mengenai proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja yang ingin dicapai organisasi dan diharapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan bahan perbaikan sistem dan penyelenggaraan manajemen kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dimasa yang akan datang antara lain dengan dilakukannya melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja. Serta pengembangan nilai akuntabilitas di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan.

B. Gambaran Umum OPD : Sekretariat DPRD Kota Medan

Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Medan, yaitu fungsi penganggaran, pengawasan dan pembentukan perda. Tugas pelayanan administratif tersebut antara lain pelayanan administratif kesekretariatan dan keuangan, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD Kota Medan dilengkapi kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana kerja serta anggaran. Dalam hal kelembagaan, sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan, dilengkapi dengan perangkat jabatan struktural, yaitu Sekretaris DPRD (Pimpinan Tinggi Pratama), 4 (empat) Kepala Bagian (Administrator) dan 12 Kepala Sub Bagian (Pengawas) yang mempunyai tugas dan fungsi yang saling terkait guna memberikan pelayanan kepada DPRD Kota Medan. Demikian pula ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran terus didayagunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan tersebut.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2021 perlu dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP merupakan bentuk pelaporan administratif tentang keseluruhan kinerja tahunan mengacu pada Rencana Kerja Tahunan dan Renstra DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026.

Fokus utama LKIP ini adalah capaian kinerja yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Medan pada tahun 2021 berdasarkan dokumen perjanjian kinerja sekretaris dewan Tahun 2021. Sedangkan untuk penggunaan anggarannya disampaikan dalam laporan keuangan berkala secara bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan keuangan akhir tahun. Namun demikian, dalam LKIP juga disampaikan pengelolaan anggaran secara umum dalam bentuk informasi keuangan yang tidak rinci seperti dalam laporan keuangan, sebagai data pembanding terhadap penyerapan anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan pada tahun yang sama, Tahun 2020 dan melengkapi capaian kinerja Tahun 2021.

C. Tugas, Fungsi dan Peran Strategis Sekretariat DPRD

Dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Tugas Sekretariat DPRD Kota Medan adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tersebut dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD sesuai peraturan dan harapan masyarakat.

D. Struktur Organisasi dan Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur

Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD (Jabatan Tinggi Pratama), membawahi 4 (empat) orang Kepala Bagian (Jabatan Administrator). Keempat Kepala Bagian tersebut masing-masing membawahi tiga Kepala Sub Bagian atau Jabatan Pengawas.
2. Kepala Bagian Umum, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
 - c. Kepala Sub Bagian Perlengkapan
3. Kepala Bagian Program dan Keuangan, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran
 - b. Kepala Sub Bagian Verifikasi
 - c. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
4. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan
 - b. Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah
 - c. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi
5. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran
 - b. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan
 - c. Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN



Selain pejabat struktural di atas, terdapat juga pejabat fungsional dan staf lain (tenaga administrasi). Adapun jumlah sumber daya manusia (ASN) secara keseluruhan yang bekerja di Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang per 31 Desember 2021, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jabatan:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan
(Desember 2021)

Jabatan	Jumlah
1. Pejabat Struktural	
a. Sekretaris DPRD	1
b. Kepala Bagian	3
c. Kasubag	12
2. Pejabat Fungsional	3
3. Tenaga Administrasi	34
Jumlah	53

2. Berdasarkan Pendidikan :

Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
(Desember 2021)

NO	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Orang
1.	Strata 3 (S3)	0	1	1
2.	Strata 2 (S.2)	3	7	10
3.	Strata 1 (S.1)	15	21	29
4.	Diploma III	1	2	3
5.	SLTA	4	4	10
6.	SLTP	1	0	0
7.	SD	0	0	0
Jumlah		24	35	53

3. Berdasarkan Golongan :

Tabel 1.3.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
(Desember Tahun 2021)

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Gol. IV	3	5	8
2.	Gol. III	13	23	36
3.	Gol. II	6	2	9
4.	Gol. I	1	0	0
Jumlah		23	30	53

4. Berdasarkan Usia

Tabel 1.4
Komposisi pegawai Berdasarkan Usia
(Desember Tahun 2021)

Usia (Tahun)	Jumlah
	Orang
50 sd 59	13
40 sd 49	23
30 sd 39	17
18 sd 29	0
Jumlah	53

E. Isu-Isu Strategis dan Peran Sekretariat DPRD Kota Medan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan untuk kurun waktu Tahun 2021-2026, Sekretariat DPRD Kota Medan juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang ini bersumber dari lingkungan eksternal Sekretariat DPRD Kota Medan yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tantangan perlu diidentifikasi, karena jika tidak direspon dengan baik maka dapat berdampak buruk bagi kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan. Sementara peluang harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar Sekretariat DPRD Kota Medan dapat menghasilkan kinerja yang unggul dan memuaskan dalam memberikan pelayanan administratif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan.

Adapun tantangan yang sekarang ini dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Medan adalah, sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan

Walaupun Nilai Indeks kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan pada Tahun 2021 sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 2,7 dari target 2,7 dengan skala 4. Meskipun capaian 100% namun target tersebut menunjukkan tingkat kepuasan yang relatif masih rendah.

2. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan mengalami peningkatan, dan ini menjadi prioritas Setwan untuk terus meningkatkan kinerjanya melalui pembentukan Tim SAKIP Tahun 2022 dengan melibatkan unsur Inspektorat, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Medan dan BAPPEDA Kota Medan. Tahun ini juga akan di *launching* e-SAKIP yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dan mendukung peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Medan serta memudahkan penyusunan LKIP serta data yang dibutuhkan bisa diperoleh secara *realtime*.

3. Jumlah Inovasi di Sekretariat DPRD Kota Medan

Sekretariat DPRD Kota Medan akan terus meningkatkan kinerjanya melalui Inovasi berkelanjutan. Tahun ini akan dilaksanakan evaluasi mandiri terhadap inovasi yang di luncurkan dua tahun terakhir, dengan tujuan menghasilkan inovasi yang lebih implemantatif dan benar benar dirasakan manfaatnya oleh DPRD serta bermanfaat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan

4. Penyelenggaraan SPIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sekretariat DPRD Kota Medan harus menyelenggarakan SPIP. Adapun tujuan penyelenggaraan SPIP adalah untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaporan keuangan yang handal, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tahun 2021 tidak ada penilaian

Tingkat Maturitas SPIP dari Inspektorat Kota Medan namun sudah dilaksanakan dalam bentuk rencana aksi untuk peningkatan Maturitas SPIP Sekretariat DPRD Kota Medan.

5. Indeks Kepuasan Anggota DPRD Kota Medan Terhadap Layanan Keuangan dan Kesejahteraan serta Administrasi DPRD

Secara Umum terhadap pelayanan keuangan dan kesejahteraan serta administrasi DPRD sudah cukup baik, ini ditandai terlaksananya pembayaran gaji dan Tunjangan DPRD serta pembayaran perjalanan dinas dengan tepat waktu, Jaminan pemeliharaan kesehatan serta penyediaan pakaian dinas setiap tahunnya. Namun terhadap perbaikan pelayanan sektor ini Sekretariat DPRD Kota Medan menjadi tantangan bagi Sekretariat DPRD yang dituntut terus meningkatkan pelayanan untuk tahun-tahun berikutnya melalui inovasi-inovasi yang berkelanjutan agar indeks pelayanan yang dicanangkan setiap tahunnya terus meningkat dan dapat diraih, tentunya hal ini membutuhkan komitmen serta kerja keras bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kota Medan.

6. Indeks Kepuasan ASN Sekretariat DPRD Kota Medan

Tahun 2021, penilaian indeks kepuasan ASN Sekretariat DPRD Kota Medan difokuskan pada pelayanan fasilitas rapat intern dan perbaikan kualitas kebersihan seluruh toilet yang ada di gedung DPRD Kota Medan. Hasilnya adalah telah terdapat perbaikan dari sisi pelayanan rapat intern Sekretariat DPRD Medan terutama dari penyajian kualitas makanan dan minuman rapat serta terdapat perbaikan yang signifikan terhadap kualitas sanitasi dan kebersihan toilet, hal ini akan terus ditingkatkan untuk tahun tahun berikutnya.

Berikut adalah beberapa permasalahan yang dijumpai oleh Sekretariat DPRD Kota Medan dalam proses penyelenggaraan pelayanan fasilitasi kepada Anggota DPRD Kota Medan. Permasalahan tersebut perlu dikenali dengan baik, karena dapat saja permasalahan tersebut menjadi penghambat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan:

1. Masih rendahnya tingkat kepuasan anggota DPRD Kota Medan atas pelayanan administratif dan dukungan fasilitatif yang diberikan Sekretariat DPRD Kota Medan.
2. Masih rendahnya kapasitas Sekretariat DPRD Kota Medan.

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD oleh Inspektorat masih belum maksimal.
4. Masih banyak SOP Sekretariat DPRD yang belum direvisi.
5. Masih terdapat ASN Sekretariat DPRD yang memiliki kompetensi kurang memadai untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada Anggota DPRD Kota Medan.
6. Masih rendahnya disiplin kerja sebagian personil untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.
7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kegiatan pelayanan dan administrasi ketatausahaan.
8. Penerapan Masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang berkelanjutan berdampak pada terkendalanya beberapa kegiatan

Sementara itu, peluang yang diberikan oleh lingkungan strategis terhadap Sekretariat DPRD Kota Medan antara lain berupa:

1. Dukungan DPRD terhadap anggaran Sekretariat DPRD. Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Dengan tugas dan fungsi tersebut, maka DPRD sangat mendukung seluruh kegiatan yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan. Dukungan tersebut terwujud dalam bentuk persetujuan anggaran yang diajukan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan.
2. Kemajuan IT yang sangat mendukung untuk kemudahan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Kota Medan. Kegiatan sidang, rapat atau kunjungan kerja anggota DPRD Kota Medan akan mudah direncanakan, dikoordinasikan dan difasilitasi penyelenggaraannya jika didukung oleh sistem informasi berbasis IT yang handal. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kota Medan harus dapat merespon kemajuan IT ini dengan sangat baik.
3. Komitmen yang tinggi dari pemerintah dan lembaga pengawas keuangan terhadap penggunaan anggaran secara disiplin. Komitmen ini sangat diperlukan agar Sekretariat DPRD Kota Medan mampu menghindari penggunaan anggaran yang tidak semestinya, dan lebih fokus untuk tujuan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi anggota DPRD Kota Medan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan pelaksanaan urusan otonomi daerah. Program dan kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam melayani dan memberi dukungan administratif, keuangan dan fasilitasi lainnya bagi terlaksananya tugas dan fungsi DPRD Kota Medan.

A. Rencana Strategis Sekretariat DPRD 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Medan untuk periode 2021-2026. Dokumen Renstra ini memiliki fungsi yang strategis sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anggota DPRD, Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan adalah dokumen perencanaan jangka menengah bagi Sekretariat DPRD Kota Medan, yang memuat arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan penyampaian pelayanan kepada DPRD Kota Medan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan. Dengan demikian, dokumen Renstra menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun program, kegiatan dan anggaran tahunan, monitoring, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja dalam kurun waktu lima tahunan.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan memerlukan waktu yang relatif panjang dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang berasal dari anggota DPRD, Sekretariat DPRD, BAPPEDA Kota Medan, unsur masyarakat dengan pendampingan oleh narasumber yang kompeten. Proses

yang panjang tersebut ditempuh karena banyak tahap yang harus dilalui dalam penyusunan Renstra, meliputi reviu atas Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan periode sebelumnya, penyusunan rancangan awal Renstra, pembahasan dalam forum perangkat daerah, koordinasi, harmonisasi serta sinkronisasi dan verifikasi oleh BAPPEDA. Tujuan melibatkan para pemangku kepentingan dimaksudkan agar Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan dapat memuat harapan para pemangku kepentingan, khususnya anggota DPRD Kota Medan sebagai pemangku kepentingan utama yang dilayani oleh Sekretariat DPRD Kota Medan.

Dalam proses penyusunan tersebut juga dipastikan bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan, yang merupakan perangkat pemerintah daerah (satuan kerja pemerintah daerah atau SKPD) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026. Dalam hal ini, sebagai bagian dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, maka muatan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan harus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah, sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 tersebut. Oleh karena itu, dalam proses perumusan dokumen Renstra ini, dokumen RPJMD Kota Medan menjadi referensi utama. Secara substantif, dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan dapat dipandang sebagai turunan dari dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Sedangkan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021-2026.

Hal-hal yang menjadi acuan dalam menyusun Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan utamanya adalah Visi dan Misi RPJMD Kota Medan, kemudian tujuan, sasaran dan target utamanya yang relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan. Agar Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026 dan mengingat Sekretariat DPRD merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Medan, maka diperlukan sinkronisasi dengan RPJMD Kota Medan. Proses sinkronisasi ini dilakukan oleh BAPPEDA Kota Medan. Hal ini untuk memastikan agar ada kesesuaian antara Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026 dengan RPJMD Kota Medan 2021-2026.

Visi dalam RPJMD Kota Medan 2021-2026 adalah “**Terwujudnya masyarakat kota Medan yang berkah, maju dan kondusif**”. Visi tersebut dicapai melalui beberapa misi, sebagai berikut:

1. Medan Berkah

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Medan Maju

Memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua.

3. Medan Bersih

Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

4. Medan Membangun

Membangun sarana dan prasara yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

5. Medan Kondusif

Menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

6. Medan Inovatif

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital*, teknologi digital dan sosial budaya.

7. Medan beridentitas

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis, toleran dalam kemajemukan, demokratis dan cinta tanah air.

Mengingat RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Perubahan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026, maka DPRD Kota Medan mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan RPJMD tersebut. Pelaksanaan peran sebagai mitra tersebut tentunya sesuai tugas dan fungsi DPRD.

Sedangkan Sekretariat DPRD Kota Medan mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan administratif dan keuangan (anggaran) sesuai peraturan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif. Namun demikian, mengingat Sekretariat DPRD juga merupakan satuan kerja atau perangkat pemerintah daerah, maka dalam melaksanakan tugas-tugasnya juga berlandaskan dan mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang relevan dari Pemerintah Kota Medan.

Untuk itu, disusun Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026 yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program.

Visi dan Misi

Visi Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026 adalah visi kota Medan sesuai yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Medan 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya masyarakat kota Medan yang berkah, maju dan kondusif”.

Untuk mencapai visi tersebut Sekretariat DPRD Kota Medan menggunakan misi Wali Kota Medan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan yaitu: **“Medan Bersih”**

Secara lebih spesifik, keterkaitan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan dengan Misi Medan Bersih adalah pada tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel” .

Tujuan dan Sasaran Tahun 2021-2026

Selanjutnya, Misi di atas dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran, sebagai berikut:

Tujuan :

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan”.

Tujuan tersebut meskipun relatif lebih operasional daripada visi organisasi, namun untuk menjadikannya lebih mudah diwujudkan selanjutnya dirumuskan sejumlah Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Medan. Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Medan yang diturunkan dari tujuan tersebut ada tiga sasaran yang meliputi :

1. Meningkatnya akuntabilitas Sekretariat DPRD Kota Medan.
2. Meningkatnya kepuasan DPRD dan ASN terhadap pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kota Medan.
3. Meningkatnya kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administratif dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Medan.

Indikator untuk mengukur sasaran di atas adalah:

1. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan.
2. Indeks Kepuasan DPRD dan ASN terhadap pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kota Medan.
3. Indeks Kepuasan pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan.
4. Nilai akuntabilitas adalah nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Agar terukur, maka masing-masing indikator memiliki target tahunan untuk periode Renstra, 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama, IKU))	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan administratif dan dukungan fasilitatif Sekretariat DPRD Kota Medan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan	62 (B)	66 (B)	69 (B)	72 (BB)	76 (BB)	81 (A)
		Indeks Kepuasan DPRD dan ASN terhadap pelayanan administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan	Indeks Kepuasan DPRD dan ASN terhadap pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kota Medan	2,70 (C)	2,74 (C)	2,78 (C)	2,82 (C)	2,86 (C)	3,07 (B)
				2,80 (C)	2,92 (C)	3,04 (C)	3,16 (B)	3,35 (B)	3,54 (A)
		Meningkatnya Kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administratif dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Medan	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	2,70 (C)	2,74 (C)	2,78 (C)	2,82 (C)	2,86 (C)	3,07 (B)

Keterangan:

Tahun 2021 adalah tahun pertama masa transisi selama 2 bulan

Ketiga indikator sasaran dalam tabel tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk mencapai tujuan, sasaran dan target dari IKU yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan strategi, arah kebijakan dan program yang disusun berdasarkan analisa kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang serta hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya. Sedangkan program mengacu kepada peraturan tentang nama-nama program.

Tabel 2.2
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 2021-2026**

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif			
MISI : Medan Bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	1. Meningkatkan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kota Medan.	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan	Meningkatkan nilai sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat DPRD Kota Medan
	2. Meningkatkan kepuasan DPRD dan ASN terhadap pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kota Medan	2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kota Medan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Sekretariat DPRD Kota Medan	1. Meningkatkan indeks kepuasan DPRD Kota Medan terhadap layanan keuangan dan kesejahteraan serta administrasi DPRD Kota Medan 2. Meningkatkan Indeks Kepuasan terhadap pelayanan administrasi umum ASN Sekretariat DPRD Kota Medan
	3. Meningkatkan kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administratif dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Medan	Meningkatkan Kualitas pelayanan terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan	Meningkatkan indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan

Selanjutnya, arah kebijakan dijabarkan kedalam program-program dan setiap program berisi kegiatan-kegiatan serta setiap kegiatan berisi sub-sub kegiatan yang relevan dan bersifat indikatif.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021-2026

Rencana program Sekretariat DPRD Kota Medan beserta kegiatan yang bersifat indikatif, artinya dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan dapat berubah atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada tiap-tiap tahun. Dengan Terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ Tanggal 20 Januari 2020 perihal percepatan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah, maka Sekretariat DPRD Kota Medan melaksanakan pemetaan program kegiatan Tahun 2021 yang disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Perencanaan program/kegiatan beserta sub kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026 yang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota

Meliputi Kegiatan dan Sub Kegiatan indikatif, yaitu:

- a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - 2) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan penyusunan Perubahan dokumen DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - 4) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan dan semesteran
 - 5) Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

- c. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - 1) Pengamanan barang milik daerah SKPD
 - 2) Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- d. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - 1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - 3) Bimbingan teknis implementasi peraturan dan perundang-undangan
- e. Administrasi umum perangkat daerah ;
 - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor
 - 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
 - 3) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - 4) Penyediaan bahan logistik kantor
 - 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 6) Penyediaan bahan/material
 - 7) Fasilitasi kunjungan tamu
 - 8) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 9) Penatausahaan arsip dinamis SKPD
 - 10) Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - 1) Pengadaan mebel
 - 2) Pengadaan peralatan mesin dan lainnya
 - 3) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - 4) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- g. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - 4) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- h. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 3) Pemeliharaan Mebel

- 4) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - 5) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - 6) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - 7) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- i. Penataan Organisasi
- 1) Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi
 - 2) Monitoring/evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana
 - 3) Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
- j. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- 1) Fasilitasi keprotokolan
- k. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- 1) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 - 2) Penyediaan pakaian dinas dan atribut
 - 3) Pelaksanaan *medical check Up*
- l. Layanan Administrasi DPRD
- 1) Fasilitasi fraksi DPRD
 - 2) Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- 1) Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah
 - 2) Pembahasan rancangan peraturan daerah
 - 3) Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik
- b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
- 1) Pembahasan KUA-PPAS
 - 2) Pembahasan perubahan KUA-PPAS
 - 3) Pembahasan APBD
 - 4) Pembahasan APBD perubahan
 - 5) Pembahasan laporan semester
 - 6) Pembahasan pertanggungjawaban APBD

- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 1) Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum
 - 2) Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur
 - 3) Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat
 - 4) Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian
 - 5) Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan
 - 6) Pengawasan Penggunaan anggaran
 - 7) Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 1) Orientasi DPRD
 - 2) Pendalaman tugas DPRD
 - 3) Publikasi dan dokumentasi dewan
 - 4) Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli
 - 5) Penyediaan tenaga ahli fraksi
 - 6) Penyusunan program kerja DPRD
- e. Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat
 - 1) Kunjungan kerja dalam daerah
 - 2) Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD
 - 3) Pelaksanaan Reses
- f. Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD
 - 1) Penyusunan kode etik DPRD
 - 2) Pengawasan kode etik DPRD
- g. Pembahasan kerjasama daerah
 - 1) Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah
- h. Fasilitasi tugas DPRD
 - 1) Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah
 - 2) Fasilitasi tugas pimpinan DPRD

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021-2026

Indikator kinerja program digunakan untuk mengukur kinerja program. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur program Sekretariat DPRD Kota Medan, adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Program (IKP)

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan tugas dan fungsi DPRD

Keterangan : Dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026 nama program pada point 1 adalah : **Program administrasi umum Sekretariat DPRD kabupaten/ Kota**. Nama Program pada point 1 tersebut tercantum dalam DPA Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021. Perbedaan urutan nomenklatur ini dikarenakan belum update nya Aplikasi SIPD terhadap Permendagri No.90 Tahun 2019

Dalam program terdapat kegiatan-kegiatan indikatif yang direncanakan selama lima tahun–periode Renstra. Adapun indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja masing-masing kegiatan. Pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, digunakan indikator sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / sub kegiatan (Output)
1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang di susun
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun
1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA–SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / sub kegiatan (Output)
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun
1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen laporan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM 2. Jumlah dokumen laporan Reformasi Birokrasi 3. Jumlah dokumen laporan survey kepuasan <i>stakeholders</i> 4. Jumlah dokumen laporan akselerasi pelayanan melalui inovasi perangkat daerah 5. Jumlah dokumen laporan sistem pengendalian intern pemerintahan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekwensi gaji dan tunjangan yang disediakan untuk ASN
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD
2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis realisasi anggaran
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD pada perangkat daerah
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya database digital barang milik daerah pada Sekretariat DPRD Kota Medan
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pakaian dinas harian 2. Tersedianya pakaian dinas hari hari tertentu
4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Daerah
4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan administrasi Umum 2. Indeks Kepuasan ASN terhadap administrasi umum perangkat daerah
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor	Jenis alat listrik dan elektronik yang disediakan

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / sub kegiatan (Output)
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
5.3	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jenis alat rumah tangga yang disediakan
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan penyediaan makanan dan minuman
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jenis barang cetakan yang disediakan 2. Jumlah penggandaan
5.6	Penyediaan Bahan / Material	1. Jenis barang cetakan yang disediakan 2. Tersedianya alat tulis kantor kebutuhan
5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terselenggaranya fasilitasi kunjungan tamu
5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan penyelenggaraan rapat internal Sekretariat DPRD
5.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Termutakhirkannya aplikasi SIMANJA
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
6.1	Pengadaan Mebel	Jenis Mebel Kantor
6.2	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jenis Peralatan dan mesin lainnya
6.3	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Indeks kepuasan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
6.4	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks kepuasan atas layanan jasa surat menyurat
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor 2. Terlaksananya senam kesegaran jasmani 3. Terselenggaranya pengamanan kantor dan rumah Pimpinan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah Sekretariat DPRD Kota Medan
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / sub kegiatan (Output)
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas operasional roda 2 yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas operasional roda empat yang dipelihara
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
8.4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis pemeliharaan gedung kantor
8.5	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara
8.6	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara
9	Penataan Organisasi	Terlaksananya penataan organisasi
9.1	Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi	1. Nilai SAKIP 2. Nilai Reformasi Birokrasi
9.2	Monitoring / Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1. Jumlah Inovasi Pelayanan 2. Tingkat Maturitas SPIP Sekretariat DPRD Kota Medan
9.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan kinerja
10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya fasilitasi keprotokolan dan komunikasi Pimpinan
10.1	Fasilitasi Keprotokolan	Indeks kepuasan fasilitasi keprotokolan
11	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD
11.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Frekuensi gaji dan tunjangan yang disediakan untuk anggota DPRD
11.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jenis pakaian dinas DPRD yang disediakan
11.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang diperiksa kesehatannya
12	Layanan Administrasi DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi DPRD
12.1	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah fraksi yang di fasilitasi
12.2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Indeks kepuasan fasilitasi rapat paripurna

Tabel 2.5

**Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / sub kegiatan (Output)
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Indeks Kepuasan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD
1.1	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Tersusunnya program pembentukan Perda
1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang dibahas
1.3	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik rancangan peraturan daerah yang di hasilkan
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran
2.1	Pembahasan KUA -PPAS	Jumlah laporan KUA-PPAS Kota Medan
2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah laporan perubahan KUA-PPAS Kota Medan
2.3	Pembahasan APBD	Jumlah laporan APBD yang dihasilkan
2.4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah laporan perubahan APBD yang dihasilkan
2.5	Pembahasan laporan Semester	Jumlah dokumen pembahasan laporan semester
2.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah laporan hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya fungsi pengawasan Pemerintahan
3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya rapat pengawasan urusan bidang pemerintahan dan hukum
3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya rapat pengawasan urusan bidang Infrastruktur
3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya rapat pengawasan urusan bidang kesejahteraan rakyat
3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya rapat pengawasan urusan bidang perekonomian
3.5	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksaan Keuangan	Terlaksananya rapat pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK
3.6	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya rapat evaluasi penggunaan anggaran
3.7	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / sub kegiatan (Output)
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas DPRD
4.1	Bimbingan Teknis DPRD	Terselenggaranya bimbingan teknis DPRD
4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jenis Media Informasi Publikasi
4.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Indeks kepuasan penyediaan kelompok pakar dan tim ahli
4.4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah fraksi yang diberikan jasa tenaga ahli
4.5	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah program kerja DPRD yang disusun
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat
5.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah
5.2	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya FGD pokok pikiran DPRD
5.3	Pelaksanaan Reses	Jumlah pelaksanaan reses
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya penyusunan dan pengawasan kode etik DPRD
6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya kode etik DPRD
6.2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terselenggaranya sosialisasi kode etik dan tatib DPRD Kota Medan
7	Pembahasan Kerjasama Daerah	Terlaksananya pembahasan kerjasama daerah
7.1	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Indeks kepuasan fasilitasi persetujuan kerjasama daerah
8	Fasilitasi Tugas DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi tugas DPRD
8.1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Indeks kepuasan fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah
8.2	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Indeks kepuasan fasilitasi tugas pimpinan DPRD

Selanjutnya Sekretariat DPRD Kota Medan menuangkan sasaran, indikator dan target tahunan tersebut kedalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan dengan Walikota Medan. Sekretaris DPRD selama Tahun 2021 harus mencapai target pada tahun yang sama. Pencapaian kedua sasaran strategis tersebut dilakukan melalui strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan.

B. Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan Tahun 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan dapat juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Salah satu kriteria penyusunan dan pelaporan LKIP yang baik adalah bahwa Perjanjian Kinerja dengan sasaran strategis dan indikator, serta target yang direncanakan untuk satu tahun anggaran, nilai capaian targetnya setidaknya harus mencapai 100%, atau melebihi target. Apabila nilai capaian kinerja kurang dari target yang ditetapkan maka harus bisa dijelaskan dan dianalisis mengapa target kurang dapat dipenuhi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang merupakan tahun pertama dalam tahap masa transisi pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026. Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD Kota Medan), sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administratif dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD Kota medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	2.7

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya Kapasitas Sekretariat DPRD Kota Medan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan	B
		Jumlah Inovasi Sekretariat DPRD Kota Medan	8
		Tingkat Maturitas SPIP Sekretariat DPRD Kota Medan	2,5
		Indeks kepuasan anggota DPRD Kota Medan terhadap layanan keuangan dan kesejahteraan serta administrasi DPRD	2,6
		Indeks kepuasan ASN Sekretariat DPRD Kota Medan	2,8

Dalam menjalankan program/kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021, Pemerintah Kota Medan mengalokasikan anggaran untuk Sekretariat DPRD Kota Medan sebesar Rp169.364.356.163,00 dan mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp200.364.355.343,00 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.7

**Anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan
Anggaran Tahun 2021**

No	Program	Anggaran (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah perubahan
1	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	63.596.012.218,00	76.610.314.848,00
2	Penunjang Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	105.768.343.945,00	123.754.040.495,00
	Jumlah	169.364.356.163,00	200.364.355.343,00

Catatan : Total anggaran yang tercantum dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 adalah total anggaran sebelum perubahan APBD 2021 yaitu sebesar Rp169.364.356.163,00

Tugas Sekretaris DPRD Kota Medan dengan semua staf di bawahnya, sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 adalah memberikan pelayanan administratif dan dukungan agar tugas-tugas DPRD dapat dilaksanakan secara baik. Karena itu, kinerja Sekretaris atau Sekretariat DPRD yang dinilai adalah sejauh mana layanan tersebut dapat memperlancar tugas dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021 yang merupakan tahun pertama masa transisi selama 2 bulan pelaksanaan Renstra 2021-2026, yang kemudian dituangkan ke dalam DPA 2021. Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 ini juga sebagai alat ukur keberhasilan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026.

Data dalam tabel di bawah ini menggambarkan rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap dua program yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, yaitu Tahun 2021.

Tabel 2.8
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021
 Sekretariat DPRD Kota Medan**

No	Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran 2021 (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Program Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota		105.768.343.945,00	123.754.040.495,00
1.		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.528.497.400,00	1.935.752.404,00
1.1		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	126.890.000,00	127.879.601,00
1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	126.890.000,00	127.879.601,00
1.3		Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	126.920.000,00	127.909.601,00
1.4		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA –SKPD	126.917.900,00	127.907.501,00
1.5		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.020.879.500,00	1.424.176.100,00
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.570.863.100,00	11.812.079.516,00
2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.041.889.000,00	11.041.889.000,00
2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	183.534.100,00	362.342.516,00
2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	112.250.000,00	144.950.000,00

No	Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran 2021 (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
2.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	120.940.000,00	145.648.000,00
2.5		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	112.250.000,00	117.250.000,00
3.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	406.189.100,00	428.050.908,00
3.1		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	406.189.100,00	428.050.908,00
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.003.719.150,00	25.155.169.150,00
4.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	393.664.150,00	392.464.150,00
4.2		Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	12.480.230.000,00	22.689.830.000,00
4.3		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang undangan	2.129.825.000,00	2.072.875.000,00
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.663.463.295,00	4.876.519.453,00
5.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor	296.130.000,00	307.405.212,00
5.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	285.307.920,00	1.047.372.200,00
5.3		Penyediaan Peralatan rumah tangga	68.155.000,00	37.540.000,00
5.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	355.723.000,00	461.381.116,00
5.5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	284.980.000,00	280.880.000,00
5.6		Penyediaan Bahan / Material	287.170.000,00	311.458.600,00
5.7		Fasilitasi Kunjungan Tamu	160.150.000,00	187.952.050,00
5.8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.020.000,00	203.590.000,00
5.9		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	1.519.827.375,00	2.038.940.275,00
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.488.988.000,00	6.078.962.200,00
6.1		Pengadaan Mebel	117.050.800,00	332.035.000,00
6.2		Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	782.140.000,00	3.369.470.000,00
6.3		Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	430.257.200,00	444.977.200,00
6.4		Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1.159.540.000,00	1.932.480.000,00

No	Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran 2021 (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.019.151.000,00	10.251.818.232,00
7.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.525.000,00	332.192.232,00
7.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.553.705.000,00	2.553.705.000,00
7.3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	414.020.000,00	414.020.000,00
7.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.750.901.000,00	6.951.901.000,00
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.411.855.000,00	7.428.583.504,00
8.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	636.035.000,00	823.427.020,00
8.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.510.230.000,00	1.705.538.828,00
8.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.303.220.000,00	1.409.780.424,00
8.4		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.643.955.000,00	1.818.275.000,00
8.5		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	690.360.000,00	1.021.556.808,00
8.6		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	628.055.000,00	650.005.424,00
9		Penataan Organisasi	2.394.054.100,00	2.604.124.100,00
9.1		Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi	1.116.085.000,00	1.178.385.000,00
9.2		Monitoring / Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.141.435.000,00	1.289.205.000,00
9.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	136.534.100,00	136.534.100,00
10.		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.305.841.800,00	2.711.679.028,00
10.1		Fasilitasi Keprotokolan	2.305.841.800,00	2.711.679.028,00
11		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	49.288.916.000,00	49.280.756.000,00
11.1		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	48.194.844.000,00	48.194.844.000,00
11.2		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	886.677.000,00	881.117.000,00

No	Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran 2021 (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
11.3		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	205.395.000,00	204.795.000,00
12.		Layanan Administrasi DPRD	983.806.000,00	1.190.546.000,00
12.1		Fasilitasi Fraksi DPRD	68.320.000,00	103.840.000,00
12.2		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	915.486.000,00	1.086.706.000,00
4.4	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR		63.596.012.218,00	76.610.314.848,00
1.		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	8.358.983.770,00	8.512.334.668,00
1.1		Penyusunan dan Pembahasan Program pembentukan peraturan daerah	2.208.083.770,00	2.230.719.386,00
1.2		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5.846.970.000,00	5.904.135.282,00
1.3		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	303.930.000,00	377.480.000,00
2.		Pembahasan kebijakan anggaran	3.802.233.830,00	3.822.025.850,00
2.1		Pembahasan KUA -PPAS	756.705.770,00	760.664.174,00
2.2		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	756.705.770,00	760.664.174,00
2.3		Pembahasan APBD	747.192.670,00	751.151.074,00
2.4		Pembahasan APBD Perubahan	745.353.270,00	749.311.674,00
2.5		Pembahasan laporan Semester	30.670.580,00	30.670.580,00
2.6		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	765.605.770,00	769.564.174,00
3.		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	21.792.109.168,00	26.412.914.400,00
3.1		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5.212.606.000,00	6.626.531.808,00
3.2		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	6.416.450.000,00	7.786.531.808,00
3.3		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.908.446.564,00	5.765.248.372,00
3.4		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5.195.252.564,00	6.175.248.372,00
3.5		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksaan Keuangan	14.077.770,00	14.077.770,00
3.6		Pengawasan Penggunaan Anggaran	10.176.270,00	10.176.270,00

No	Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran 2021 (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
3.7		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	35.100.000,00	35.100.000,00
4		Peningkatan Kapasitas DPRD	13.779.307.500,00	15.256.889.500,00
4.1		Bimbingan Teknis DPRD	4.106.545.000,00	2.666.545.000,00
4.2		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	5.903.900.000,00	8.713.840.000,00
4.3		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.706.545.000,00	2.706.545.000,00
4.4		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	725.105.000,00	725.105.000,00
4.5		Penyusunan Program Kerja DPRD	337.212.500,00	444.854.500,00
5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	7.693.326.670,00	13.706.548.170,00
5.1		Kunjungan Kerja dalam Daerah	197.880.000,00	107.940.000,00
5.2		Penyusunan Pokok -pokok Pikiran DPRD	219.838.270,00	231.264.170,00
5.3		Pelaksanaan Reses	7.275.608.400,00	13.367.344.000,00
6		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	852.166.740,00	1.043.899.428,00
6.1		Penyusunan Kode Etik DPRD	391.180.970,00	496.824.000,00
6.2		Pengawasan Kode Etik DPRD	460.985.770,00	547.075.428,00
7		Pembahasan Kerjasama Daerah	1.356.815.770,00	911.815.770,00
7.1		Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	1.356.815.770,00	911.815.770,00
8		Fasilitasi Tugas DPRD	5.961.068.770,00	6.943.887.062,00
8.1		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2.839.293.770,00	2.864.338.982,00
8.2		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3.121.775.000,00	4.079.548.080,00

Pada tabel di atas tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, jumlah anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp169.364.356.163,00 dan mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp200.364.355.343,00,00 untuk membiayai 2 program 20 kegiatan dan 75 Sub Kegiatan pada Tahun 2021. Terhadap penilaian dan pengukuran pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2021 akan ditampilkan didalam bab berikutnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintah. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam melayani dan memberi dukungan administratif dan keuangan bagi terlaksananya tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Namun demikian, mengingat kinerja DPRD Kota Medan terkait erat dengan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dalam melayani DPRD Kota Medan, maka akan juga dibahas sekilas kinerja DPRD Kota Medan.

Capaian kinerja Sekretariat DPRD adalah kinerja satuan kerja pemerintah daerah atau organisasi pemerintah daerah (SKPD) yang merupakan bagian dari kinerja lembaga eksekutif - Pemerintah Kota Medan yang dipimpin Walikota dan Wakil Walikota Medan. Untuk itu, fokus utama LKIP adalah kinerja Sekretariat DPRD sebagai SKPD yang diberi tugas melayani dan memberi dukungan administratif dan pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Pembahasan capaian kinerja lembaga DPRD Kota Medan dalam LKIP dimaksudkan untuk memberikan keterkaitannya dengan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan.

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap:

1. Capaian kinerja Sasaran Strategis, yang tercantum dalam Perjanjian Kerja, yang telah direview dengan mengacu kepada Renstra 2021-2026
2. Capaian kinerja masing-masing program dari dua Program pada Sekretariat DPRD Kota Medan.

Pengukuran kinerja program ini dimaksudkan untuk memberikan informasi rinci tentang kinerja masing-masing program yang ada di Sekretariat DPRD Kota Medan. Dengan demikian, akan dapat diketahui program-program apa saja yang memiliki capaian kinerja baik, sedang dan kurang atau bermasalah. Juga dapat diketahui, capaian kinerja kegiatan-kegiatan apa saja yang baik, sedang, dan kurang dalam setiap program, sebagai bahan atau acuan untuk perbaikan pada masa berikutnya.

1. Pengukuran Capaian Kinerja pada Sasaran Sasaran Strategis

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran dan didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Selanjutnya, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Medan dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran .

Adapun capaian kinerja diukur dengan membanding antara Realisasi dengan Rencana Target dikalikan 100%, sebagaimana formula di bawah ini:

$$\frac{\text{Realisasi Target}}{\text{Rencana Target}} \times 100\% = \text{.....}\%$$

Selanjutnya, dari data capaian masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Strategis pertama dan kedua dapat diukur rata-rata capaian kinerja sasaran strategis pertama, sasaran strategis kedua, dan rata-rata keseluruhan sasaran strategis.

Realisasi sasaran strategis pada perjanjian kinerja Tahun 2021 diukur mengikuti indikator kinerja yang digunakan. Dalam hal ini rumus yang digunakan dalam menentukan realisasi sebagai berikut :

- a. Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan.
 = Nilai Kepuasan pada 15 jenis layanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan / 15.

Selanjutnya nilai hasil dari perhitungan dengan rumus diatas, di konversikan dalam standar mutu berupa nilai capaian kinerja .

- b. Nilai SAKIP yang diperoleh dari Inspektorat.
- c. Jumlah Inovasi Sekretariat DPRD Kota Medan
- d. Tingkat Maturitas SPIP Sekretariat DPRD Kota Medan
- e. Indeks kepuasan Anggota DPRD Kota Medan terhadap layanan keuangan dan kesejahteraan serta administrasi DPRD

Agar dapat dilakukan analisis terhadap analisa maka ditetapkanlah standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program,kegiatan dan sub kegiatan selama Tahun 2021. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagaimana tercantum didalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 80 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 – 70	Baik
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai)
6	C	> 30 – 50	Kurang
7	D	> 0 – 30	Sangat kurang

2. Pengukuran Capaian Kinerja pada Program

Selain pengukuran capaian kinerja pada Sasaran Strategis tersebut, juga akan dilakukan pengukuran capaian kinerja masing-masing program dengan membanding:

$$\frac{\text{Realisasi Target Indikator Kinerja kegiatan}}{\text{Rencana Target Indikator Kinerja kegiatan}} \times 100\% = \dots \%$$

Untuk memudahkan, tampilan pengukuran diuraikan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini:

Tabel 3.2

CONTOH:

Capaian Program Penunjang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program	Indikator Kinerja Output	Fomulasi Pengukuran Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas Pelayanan dukungan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan fasilitasi pembentukan peraturan daerah (Data hasil Survey 2021)	2,74 Nilai	2,74 Nilai	100
		Jumlah pembentukan ranperda yang di fasilitasi	6 ranperda	6 Ranperda	100%
		Indeks Kepuasan Penyediaan Tenaga Ahli (data hasil Survey 2021)	3 Nilai	2,78 Nilai	92,66
Rata-rata capaian indikator kinerja - <i>output</i> pada Program ini					97,33

Kemudian, berdasarkan data rata-rata capaian kinerja *output* masing-masing program, dapat diperoleh rata-rata capaian kinerja seluruh program yang ada di Sekretariat DPRD Kota Medan pada tahun 2021, yang pada tahun 2021 terdapat 2 program:

$$\frac{\text{Jumlah rata-rata persentase capaian output 2 program}}{2 \text{ program}} = \dots \%$$

Seluruh rata-rata program 1 dan program 2 dijumlah, kemudian dibagi 2 program.

B. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan

Capaian sasaran strategis/indikator kinerja utama (IKU) adalah capaian terhadap kinerja yang tertulis dan disepakati dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan Tahun 2021 dengan Walikota Medan. Dalam perjanjian kinerja tersebut terdapat 2 (dua) IKU.

Tabel 3.3
**Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja:
 Sekretariat DPRD Kota Medan
 Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi/ Capaian Target	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administratif dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Medan	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan.	Nilai 2,7 (dari skala 4)	2,7	100
Rata-rata capaian kinerja dari Sasaran Strategis Pertama					100%
2.	Meningkatnya Kapasitas Sekretariat DPRD Kota Medan	1. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan	62 (B)	63	≥100
		2. Jumlah Inovasi Sekretariat DPRD Kota Medan	8	8	100
		3. Tingkat Maturitas SPIP Sekretariat DPRD Kota Medan	2,5	Tidak ada kegiatan penilaian SPIP oleh Inspektorat	-
		4. Indeks kepuasan anggota DPRD Kota Medan terhadap layanan keuangan dan kesejahteraan serta administrasi DPRD	2,6	2,8	≥100
		5. Indeks kepuasan ASN Sekretariat DPRD Kota Medan	2,80	2,85	≥100
Rata- rata capaian kinerja Sasaran Strategis Kedua					100%
Rata-rata kinerja Sasaran Strategis Pertama dan Kedua					100%

Keterangan:

Realisasi atau capaian target indikator kinerja pada Sasaran Strategis Pertama adalah 100%, yang merupakan hasil dari pengukuran Indeks Kepuasan Pelayanan yang mencapai nilai 2,7 dari target 2,7 dari skala 4 (sangat memuaskan). Untuk realisasi tingkat maturitas Sekretariat DPRD Kota Medan tidak terealisasi di karenakan tidak adanya penilaian Inspektorat Kota Medan namun sudah dilaksanakan rencana aksi untuk peningkatan Maturitas SPIP Sekretariat DPRD Kota Medan

➤ **Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan DPRD Kota Medan Terhadap Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan**

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) IKU yaitu:

“Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan”

Capaian Kinerja IKU ini adalah 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi IKU sesuai dengan target yang ditetapkan. Faktor utama yang mendukung keberhasilan pencapaian atas IKU ini adalah; penyediaan sarana dan prasarana pendukung rapat /sidang yang berkualitas, perbaikan kualitas sarana dan prasarana gedung kantor yang terus dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dan kemajuan teknologi informasi yang memudahkan anggota dewan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan terutama informasi tentang hak administrasi dan keuangan yang dapat diperoleh secara *realtime*.

Serta beberapa faktor lainnya diantaranya :

- 1) Nilai indek kepuasan Layanan fasilitasi keprotokolan; layanan ini memperoleh hasil yang lebih baik dari rata-rata jenis layanan lainnya yaitu senilai 3,11 dari target nilai 3 yang di tetapkan dalam dokumen rencana kerja tahun 2021. (sumber: Hasil Survey 2021)
- 2) Layanan Fasilitasi Pimpinan; layanan ini memperoleh hasil yang sama dengan layanan fasilitasi keprotokolan yaitu senilai 3,11 dari target nilai 3 yang ditetapkan didalam dokumen rencana kerja tahun 2021. (sumber: Hasil Survey 2021)
- 3) Layanan penyediaan perjalanan dinas; layanan ini mengalami peningkatan yaitu senilai 2,85 dibanding dengan tahun 2020 senilai 2,76. Meskipun kenaikan capaian layanan ini belum signifikan namun hal ini menjadi modal untuk terus memperbaiki kinerja sesuai dengan target kinerja didalam renstra 2021-2026. (sumber: Hasil Survey 2021)
- 4) Layanan fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat (reses) ; layanan ini mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu senilai 2,81 jika dibanding dengan tahun 2020 senilai 2,53. (sumber: Hasil Survey 2021)

➤ **Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Sekretariat DPRD Kota Medan**

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui 5 (lima) IKU yaitu :

1) Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan

Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan mengalami peningkatan dengan capaian nilai 63 dari target nilai 62 atau sebesar $\geq 100\%$. Hal ini menjadi prioritas Setwan untuk terus meningkatkan kinerjanya melalui pembentukan Tim SAKIP tahun 2022 dengan melibatkan unsur Inspektorat, Bagian Organisasi dan BAPPEDA Kota Medan.

2) Jumlah inovasi Sekretariat DPRD Kota Medan

Capaian IKU ini menghasilkan capaian kinerja output sebesar 100 persen, dengan menghasilkan 8 produk inovasi dari target 8 Inovasi. Produk inovasi ini dalam tahap pengembangan dengan rincian :

- Sistem Manajemen Aset Terpadu /SIMASDU
- Mari Jaga Toilet Kota/New Majatoki
- E-Nadine
- E-SAKIP
- E-NA/ E-Naskah Akademik
- DPRD Menyapa
- Reses Tematik
- Infografis dan video tutorial SOP

3) Tingkat Maturitas SPIP Sekretariat DPRD Kota Medan

Tahun 2021 tidak ada penilaian dari Inspektorat terhadap tingkat maturitas SPIP ini, sehingga Sekretariat DPRD tidak dapat dijadikan hal inii sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalan terhadap target kinerja ini.

4) Indeks kepuasan anggota DPRD Kota Medan terhadap layanan keuangan dan dan kesejahteraan serta administrasi DPRD

Secara umum terhadap layanan keuangan sudah cukup baik, hal ini ditandai dengan tercapainya target kinerja senilai 2,8 dari target senilai

2,6 atau ≥ 100 %. Hal utama yang mendukung tercapainya target kinerja ini adalah terpenuhinya hak keuangan DPRD dengan tepat waktu namun terdapat hal-hal yang perlu perbaikan ditahun tahun berikutnya terutama layanan yang menyangkut kesejahteraan dan administrasi DPRD antara lain: perlunya peningkatan pelayanan *medical checkUp* yang harus mengakomodir seluruh kebutuhan anggota DPRD, perlunya peningkatan kualitas Pakaian dinas DPRD. (sumber: temuan Hasil Survey 2021)

5) Indeks kepuasan ASN Sekretariat DPRD Kota Medan

Hasil capaian IKU ini sebesar 100%. Penilaian indeks kepuasan ASN Sekretariat DPRD Kota Medan di fokuskan pada pelayanan fasilitasi rapat internal berupa perbaikan kualitas penyediaan makanan dan minuman rapat serta perbaikan yang signifikan pada kualitas sanitasi dan kebersihan toilet yang telah dapat dirasakan perubahannya. (sumber: temuan Hasil Survey 2021)

Capaian kinerja Sasaran/Indikator Kinerja Utama tersebut di atas diperoleh melalui capaian kinerja pada semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Medan selama Tahun 2021, termasuk dari layanan atau dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan. Untuk itu, perlu diketahui juga capaian kinerja masing-masing program dari 2 program yang dikelola Sekretariat DPRD Kota Medan pada Tahun 2021. Berikut ini capaian masing-masing program yang terkait dengan tugas, fungsi dan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Program **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota** diukur dengan menggunakan Indikator “Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah”. Target atas indikator tersebut adalah 100% dengan persentase capaian rata –rata sebesar 95,91%. Sebagaimana tercantum dalam tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4

Capaian Indikator Program
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

No	Kegiatan	Persentase rata rata capaian
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98,99
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80,50
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100
9	Penataan Organisasi	100
10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100
11	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	89
12	Layanan Administrasi DPRD	96
	Capaian Program.....	96,04

Selanjutnya untuk mengetahui rincian capaian atas indikator kegiatan kegiatan pada **Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota** tergambarakan persentase capaian kegiatan pada tabel-tabel berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja output terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan capaian rata –rata kinerja sebesar 100% berupa penyediaan dokumen RKA-RKA Perubahan, DPA-DPA Perubahan serta penyediaan dokumen laporan Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.1

Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Output kegiatan / sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jumlah dokumen RKA yang di susun	1 dokumen	1 dokumen	100
Jumlah dokumen Perubahan RKA yang di susun	1 dokumen	1 dokumen	100
Jumlah dokumen DPA yang di susun	1 dokumen	1 dokumen	100
Jumlah dokumen Perubahan DPA yang di susun	1 dokumen	1 dokumen	100
1. Jumlah dokumen laporan pembangunan zona integritas menuju WBK / WBBM	1 laporan	1 laporan	100
2. Jumlah dokumen laporan reformasi Birokrasi	1 dokumen	1 dokumen	100
3. Jumlah dokumen laporan survey kepuasan stake holders	1 dokumen	1 dokumen	100
4. Jumlah dokumen laporan akselerasi pelayanan melalui inovasi perangkat daerah.	1 dokumen	1 dokumen	100
5. Jumlah dokumen laporan sisitem pengendalian intern pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Capaian Kegiatan			100

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja output berupa cakupan waktu terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah dengan capaian rata-rata kegiatan sebesar 100%. Kegiatan ini berupa penyediaan Gaji dan tunjangan ASN, Penatausahaan dan verifikasi keuangan, penyediaan dokumen laporan keuangan, laporan prognosis dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4.2

Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100

Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	12 laporan	12 laporan	100
Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Lapoan	1 laporan	100
Jumlah dokumen Laporan keuangan semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	100
Jumlah laporan Prognosis realisasi anggaran	1 laporan	1 laporan	100
capaian kegiatan.....			100

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja keluaran/output berupa jumlah dokumen administrasi BMD (barang milik daerah) pada perangkat daerah sebanyak 1 dokumen dengan capaian keluaran sebanyak 1 dokumen atau 100% sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4.3
Capaian Output kegiatan/Sub Kegiatan
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Output kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Tersedianya database digital barang milik daerah pada Sekretariat DPRD	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja keluaran/output berupa persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan capaian output sebesar 99%. Kegiatan ini berupa penyediaan Pakaian dinas harian ASN dan Pakaian Batik ASN untuk hari-hari tertentu dan Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan daerah serta pelaksanaan bimbingan teknis bagi ASN sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.4
 Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
 Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
1. Tersedianya pakaian dinas harian	187	184	98
2. Tersedianya pakaian dinas hari hari tertentu	187	184	98
Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Daerah	12 kali	12 kali	100
Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	120	120	100
Capaian Kegiatan.....			99

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator kinerja keluaran/output berupa terlaksananya pemenuhan kebutuhan administrasi umum dengan capaian hasil rata-rata kegiatan sebesar 98,99%. Kegiatan ini berupa peyediaan alat listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, alat rumah tangga serta penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.5
 Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
 Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jenis alat listrik dan elektronik yang disediakan	10 jenis	10 jenis	100
Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis	3 jenis	100
Jenis alat rumah tangga yang disediakan	3 jenis	3 jenis	100
Indeks Kepuasan penyediaan makanan dan minuman	3 nilai	2,85	95
1. Jenis barang cetakan yang disediakan	8 Jenis	8 jenis	100
2. Jumlah penggandaan	200 eksp	200 eksp	100

Indikator Kinerja Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
1. Jenis barang cetakan kebutuhan administrasi umum yang disediakan	5 jenis	5 Jenis	100
2. Tersedianya alat tulis kantor kebutuhan administrasi umum	1 tahun	1 tahun	100
Terselenggaranya fasilitasi kunjungan tamu	1 tahun	1 tahun	100
Indeks Kepuasan penyelenggaraan rapat internal Sekretariat DPRD	3 nilai	2,85	95
Termutakhirkannya aplikasi SMARTWAN	1 apk	1 apk	100
Capaian Kegiatan			98,99

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja keluaran/output berupa tersedianya Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja output sebesar 80,50%. terdapat 1 sub kegiatan yang sangat minim pencapaiannya yaitu pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya. Rincian capaian rata-rata kegiatan tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.6
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jenis Mebel Kantor	1 jenis	1 jenis	100
Jenis Peralatan dan mesin lainnya	3 jenis	1 jenis	33
Indeks kepuasan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	3 nilai	2,67	89
Jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	3 jenis	3 jenis	100
Rata-rata capaian kegiatan			80,5

Keterangan : untuk target yang tidak terealisasi dikarenakan harga tidak sesuai dengan Palfon anggaran / kemahalan dan pengadaan Videotron yang dibatalkan dikarenakan provider tidak memenuhi kualifikasi (tender dibatalkan) serta waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini menggunakan indikator keluaran cakupan waktu tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah dengan capaian rata-rata kegiatan 89%. Kegiatan ini berupa penyediaan jasa kebersihan gedung kantor selama satu tahun, jasa pengamanan gedung kantor dan rumah pimpinan di 5 lokasi selama 1 tahun, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.4.7
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Indeks kepuasan atas layanan jasa surat menyurat	3 nilai	2,7	90
Jenis penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	5 jenis	5 jenis	100
Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	4 Jenis	100
1. Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	66
2. Terlaksananya senam kesegaran jasmani	48 kali	-	
3. Terselenggaranya pengamanan kantor dan rumah Pimpinan	5 Lokasi	5 Lokasi	
Rata-rata capaian kegiatan			89

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini menggunakan indikator keluaran/output berupa cakupan waktu terpeliharanya barang milik daerah SKPD selama 1 tahun. Kegiatan ini berupa jaminan pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 serta pemeliharaan peralatan mesin dan sarana dan prasarana gedung dengan capaian rata-rata kegiatan sebesar 100% sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4.8
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	5 unit	5 unit	100
1. Jumlah kendaraan dinas operasional roda 2 yang dipelihara	3 unit	3 unit	100
2. Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 yang dipelihara	23 unit	23 unit	100
Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 jenis	8 jenis	100
Jenis pemeliharaan gedung kantor	10 jenis	10 jenis	100
Jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	7 jenis	7 jenis	100
Jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	3 jenis	100
Rata-rata capaian kegiatan			100

9. Kegiatan Penataan Organisasi

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja keluaran /output berupa terlaksananya penataan organisasi dengan capaian output kinerja sebesar 100% sebagaimana tercantum didalam tabel 3.4.9 berikut :

Tabel 3.4.9
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
1. Nilai Reformasi Birokrasi	65	-	100
2. Nilai SAKIP	62	63,3	
1. Jumlah Inovasi Pelayanan	8	8	
2. Tingkat Maturitas SPIP Sekretariat DPRD Kota Medan	Inovasi 1 keg	Inovasi 1 keg	100
Jumlah laporan kinerja	1 laporan	1 laporan	100
Rata-rata capaian kegiatan			100

Keterangan : Tidak ada nya Nilai Reformasi birokrasi karena Inspektorat tidak memberikan penilaian. Maka nilai yang di masukkan dalam rata-rata capaian kegiatan penataan organisasi adalah nilai SAKIP sebesar 63,3

10. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kegiatan ini menggunakan indikator keluaran output berupa Indeks kepuasan layanan keprotokolan dan Fasilitasi Pimpinan dengan target nilai 3. Dari hasil survey layanan ini mendapat nilai 3,11 atau $\geq 100\%$ sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.10
 Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
 Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Indeks kepuasan fasilitasi keprotokolan	3 nilai	3,11 nilai	100

11. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja keluaran/output berupa indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi DPRD yang memiliki target nilai 2,74, dengan hasil survey senilai 2,89 atau lebih dari 100 % (sumber : hasil survey layanan 2021). capaian kegiatan ini sebesar 89% sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.11
 Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
 Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan DPRD	1 tahun	1 tahun	100
1. Jenis Atribut yang disediakan 2. Jenis pakaian dinas DPRD yang disediakan	1 jenis 4 jenis	1 jenis 4 jenis	100
Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang diperiksa kesehatannya	50 orang	34 orang	68
Capaian kegiatan			89

12. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja keluaran/output berupa Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi DPRD dengan target nilai 2,74. Capaian target kinerja output kegiatan ini adalah 2,79 atau 100%. Rincian capaian target kinerja output kegiatan ini tergambar dalam tabel 3.4.12 berikut :

Tabel 3.4.12
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jumlah fraksi yang di fasilitasi	8 fraksi	8 fraksi	100
Indeks kepuasan fasilitasi rapat paripurna	3 nilai	2,79	93
Rata-rata capaian kegiatan			96,5

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD diukur dengan menggunakan indikator “Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan tugas dan fungsi DPRD”. Target atas indikator tersebut adalah 100% dengan capaian kinerja kegiatan rata-rata sebesar 94,5%. Angka capaian ini menggambarkan bahwa keseruhan kegiatan pada program yang menjadi core bussines DPRD telah berhasil di fasilitasi sebesar 81% sebagaimana tercantum dalam tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Capaian Indikator Program
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

No	Kegiatan	Persentase rata rata capaian
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	99
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	83,40

5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	66,66
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	50
7	Pembahasan Kerjasama Daerah	0
8	Fasilitasi Tugas DPRD	100
	Capaian Program	74,88

Keterangan : terdapat 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh DPRD sehingga Sekretariat DPRD tidak dapat memfasilitasi.

Selanjutnya untuk mengetahui rincian capaian atas indikator kegiatan kegiatan pada **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** tergambar persentase capaian kegiatan pada tabel–tabel berikut :

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Kegiatan ini memiliki kinerja yang baik yaitu dengan capaian 100% dari target yang direncanakan. Kegiatan ini berupa mengakomodir / fasilitasi pembahasan Ranperda–ranperda selama Tahun 2021 beserta pembuatan naskah-naskah akademik yang telah mencapai target 100% sebagaimana tercantum dalam tabel 3.5.1 berikut :

Tabel 3.5.1
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Tersusunnya program pembentukan Perda	1 laporan	1 laporan	100
Jumlah rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 ranperda	6 ranperda	100
Jumlah naskah akademik rancangan peraturan daerah yang di hasilkan	6 naskah akademik	6 naskah akademik	100
capaian kegiatan			100

2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

Kegiatan **Pembahasan kebijakan anggaran** menggunakan indikator kinerja output/ keluaran berupa persentase terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran sebesar 100%. Kegiatan memiliki kinerja yang baik

yaitu dengan capaian 100%. Namun demikian pada sub kegiatan **pembahasan laporan semester** kinerja tidak mencapai target yang di karenakan DPRD tidak menyelenggarakan kegiatan dimaksud. Rincian kinerja kegiatan pembahasan kebijakan anggaran adalah sebagaimana ditunjukkan didalam tabel 3.5.2. berikut :

Tabel 3.5.2
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran	2,7	2,7	100
Jumlah laporan KUA-PPAS Kota Medan	1 dokumen	1 dokumen	100
Jumlah laporan perubahan KUA-PPAS Kota Medan	1 dokumen	1 dokumen	100
Jumlah laporan APBD yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	100
Jumlah laporan perubahan APBD yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	100
Jumlah dokumen pembahasan laporan semester	1 dokumen	-	-
Jumlah laporan hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 laporan	1 laporan	100
Rata-rata capaian kegiatan			100

Keterangan : Pembahasan Laporan semester tidak dibahas oleh DPRD pada tahun 2021. Oleh karena itu Sekretariat DPRD sebagai fasilitator tidak dapat melaksanakan fasilitasi kegiatan ini, sehingga keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja ini tidak dapat di ukur

3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja keluaran /output berupa persentase terlaksananya fungsi pemerintahan sebesar 100 %. Capaian indikator kinerja output sebesar 84,14% . kegiatan ini ini berupa fasilitasi rapat-rapat alat kelengkapan DPRD berupa RDP, rapat pengawasan, dan fasilitasi rapat koordinasi keluar daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing alat kelengkapan dewan. Capaian kinerja tersebut tercantum dalam tabel 3.5.3 berikut :

Tabel 3.5.3
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Terlaksananya rapat pengawasan urusan bidang pemerintahan dan hukum	74 kali	66	89
Terlaksananya rapat pengawasan urusan bidang Infrastruktur	120 kali	130	100
Terlaksananya rapat pengawasan urusan bidang kesejahteraan rakyat	128 kali	219	100
Terlaksananya rapat pengawasan urusan bidang perekonomian	70 kali	91	100
Terlaksananya rapat pengawasan tindaklanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	2 kali	-	-
Terlaksananya rapat evaluasi penggunaan anggaran	4 kali	4 kali	100
Terlaksananya pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	1 Laporan	1 laporan	100
Capaian Kegiatan			99

4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja keluaran/output berupa nilai indeks kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD senilai 2,74. Capaian 2,75 atau sebesar 100%. Kegiatan ini berupa penyediaan fasilitasi Bimbingan Teknis DPRD, penyediaan media informasi (cetak dan Online), media publikasi (*indoor* dan *Outdoor*), penyediaan tenaga ahli bagi alat kelengkapan DPRD dan Fasilitasi pelaksanaan Rapat Kerja DPRD (*fullboard meeting*). Capaian kinerja kegiatan ini tercantum didalam tabel 3.5.4 berikut ini :

Tabel 3.5.4
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Terselenggaranya bimbingan teknis DPRD	4 kali	1 kali	25

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jenis Media Informasi Publikasi	13 jenis	13 jenis	100
Indeks kepuasan penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	3 nilai	2,75 nilai	92
Jumlah fraksi yang diberikan jasa tenaga ahli	8 fraksi	8 fraksi	100
Jumlah program kerja DPRD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100
capaian kegiatan			83,40

5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja output/keluaran berupa indeks kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat senilai 2,74 dengan capaian kegiatan ini senilai 2,81 atau sebesar 100%. Kegiatan ini berupa fasilitasi pelaksanaan Kunjungan kerja dalam daerah (kota) berupa monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat Kota Medan, dan fasilitasi kegiatan Reses yang diselenggarakan sebanyak 3 kali masa sidang, capaian kinerja ini tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.5.5
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jumlah kunjungan kerja dalam daerah	12 kali	12 kali	100
Terlaksananya FGD pokok pikiran DPRD	1 kali	0	0
Jumlah pelaksanaan reses	3 kali	3 kali	100
capaian kegiatan			66,66

Keterangan : Terdapat 1 indikator yang tidak dapat di ukur persentase capaian kinerjanya karena DPRD tidak melaksanakan kegiatan dan bertepatan dengan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 darurat kesehatan oleh Pemerintah sehingga kegiatan ini ditiadakan. Oleh karena itu Sekretariat DPRD tidak dapat menghitung kinerja tersebut sebagai keberhasilan atau kegagalan.

6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja output /keluaran berupa frekuensi terlaksananya penyusunan dan pengawasan kode etik. Kegiatan ini tidak dilaksanakan oleh DPRD dikarenakan bertepatan dengan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV darurat kesehatan oleh Pemerintah sehingga Sekretariat DPRD tidak dapat menghitung tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja kegiatan ini sebagaimana tercantum dalam tabel 3.5.6 berikut :

Tabel 3.5.6
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Tersusunnya kode etik DPRD	1 dokumen	0	0
Terselenggaranya sosialisasi kode etik dan tatib DPRD Kota Medan	1 kali	1 kali	100
Capaian kegiatan.....			50

7. Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah

Kegiatan ini menggunakan indikator keluaran/output berupa volume terlaksananya pembahasan kerjasama daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi DPRD Kota Medan dalam rangka kerjasama antar negara yang terikat dalam *Sister City*. Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah ini tidak terlaksana dikarenakan adanya aturan ketat dari negara negara yang tergabung dalam *sister city* serta larangan / himbauan oleh Pemerintah untuk tidak melaksanakan / melakukan aktivitas keluar negeri karena Pandemi Covid-19 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.5.7 berikut :

Tabel 3.5.7
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Indeks kepuasan fasilitasi persetujuan kerjasama daerah	3 nilai	-	-

8. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja output / keluaran berupa nilai indeks kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi tugas DPRD senilai 2,74. Capaian indikator kinerja output adalah sebesar 3,11 atau sebesar 100%. Capaian kegiatan ini dikategorikan sangat baik, sebagaimana tercantum dalam tabel 3.5.8 berikut ini :

Tabel 3.5.8
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Indeks kepuasan fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	3 nilai	3,11	100
Indeks kepuasan fasilitasi tugas pimpinan DPRD	3 nilai	3,11	100
Capaian Kegiatan			100

C. Akuntabilitas Keuangan : Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2021

Jumlah keseluruhan anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2021 setelah mengalami perubahan APBD Kota Medan adalah sebesar Rp200.364.355.343,00. Anggaran ini untuk membiayai kegiatan DPRD Kota Medan dan kegiatan Sekretariat DPRD dalam rangka melayani dan memberikan dukungan administratif dan keuangan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Pada Tahun 2021, realisasi anggaran tersebut mencapai 78,49%. Capaian anggaran ini lebih rendah dibandingkan capaian anggaran tahun 2020 sebesar 86,61%.

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Program DPRD Kota Medan
Tahun 2021

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	123.754.040.495,00	99.115.093.407,00	80,09
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	76.610.314.848,00	58.156.478.939,00	79,25
		200.364.355.343,00	157.271.572.346,00	78,49

D. Evaluasi Pencapaian Kinerja

Salah satu upaya penting untuk melakukan meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil atau kinerja yang telah dicapai selama tahun 2021. Evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja, permasalahan dan solusinya, baik solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan pada tahun 2021 maupun solusi atau saran ke depan pada tahun 2022.

Dalam proses evaluasi digunakan standar penilaian sebagai berikut :

1. Evaluasi IKU

IKU Sekretariat DPRD Kota Medan meliputi 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu :

- (1) Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan, dan
- (2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Setwan.

Untuk IKU pertama, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian pengukuran kinerja, menunjukkan kinerja IKU yang **sangat memuaskan**, yaitu 100 %. Hal ini mengindikasikan bahwa Sekretariat DPRD Kota Medan telah mampu memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan sampai tingkat kepuasan yang direncanakan oleh sekretariat DPRD Kota Medan. Namun demikian, pelayanan yang diberikan oleh sekretariat DPRD ini harus terus ditingkatkan untuk tahun-tahun selanjutnya mengingat Target 2,7 pada tahun 2021 adalah target **menengah** dari skala 4.

Jika dibandingkan dengan nilai hasil perhitungan tahun-tahun sebelumnya maka tampak adanya kenaikan capaian kinerja , sebagaimana ditunjukkan dalam tabel realisasi IKU Indeks Kepuasan pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan.

Variabel yang cukup berpengaruh terhadap capaian kinerja pada IKU ini adalah indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan pada layanan Fasilitasi pembayaran dana perjalanan dinas yang memperoleh nilai IKM 2,85, Fasilitasi rapat paripurna yang menunjukkan trend peningkatan dari tahun ketahun, Fasilitasi keprotokolan dan fasilitasi pimpinan yang memperoleh angka IKM cukup tinggi diantara jenis layanan lainnya yang di survey yaitu senilai 3,11, Fasilitasi rapat pengawasan dan penganggaran

yang menunjukkan perbaikan nilai dari tahun tahun sebelumnya yaitu nilai IKM 2,78.

Selain beberapa layanan yang mengalami peningkatan IKM, terdapat juga layanan yang masih harus terus mendapat perhatian serius diantaranya Penyediaan Naskah Akademik yang masih di nilai IKM 2,6 . Kendala utama dalam layanan ini adalah kurangnya SDM/ tenaga ahli yang disediakan untuk penyediaan naskah akademik. Kemudian terhadap layanan penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang masih dalam indeks IKM 2,6. Kendala terhadap permasalahan ini adalah : tangga akses yang mulai rusak, tidak adanya jalur evakuasi apabila terjadi bencana, tidak adanya poliklinik sebagaimana yang diinginkan dewan dan sebagainya. Terhadap permasalahan ini, maka hal tersebut akan menjadi nominatif perbaikan untuk tahun tahun berikutnya .

Berikut gambaran singkat tentang perbandingan hasil IKM 2021 Sekretariat DPRD Kota Medan dari tahun tahun sebelumnya :

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2018	2,5	2,7	100%
2	2019	2,6	2,668	100%
3	2020	2,7	2,7	100 %
4	2021	2,7	2,79	100 %

Adapun IKU kedua, menunjukan kinerja sekretariat DPRD yang sudah mencapai target dari nilai yang diharapkan. Nilai akuntabilitas Kinerja Sekwan berdasarkan penilaian inspektorat adalah B, sementara target 2021 adalah B.

Target B ini adalah nilai Realistis yang dicanangkan untuk Tahun 2021, mengingat Sekretariat DPRD untuk Tahun 2021 masih berbenah dalam Peningkatan Pelayanan kepada anggota dewan.

Penerapan akuntabilitas pada Sekretariat DPRD Kota Medan juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2018	CC	C	80%
2	2019	B	CC	80%
3	2020	B	B	100%
4	2021	B	B	100%

Nilai rata-rata dari kedua IKU tersebut adalah 100%. Dengan demikian kinerja sekretariat DPRD Kota Medan berdasarkan IKU Tahun 2021 adalah sangat memuaskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi permasalahan dalam rangka pencapaian IKU Tahun 2021 adalah sebagaimana dituangkan dalam narasi berikut ini.

E. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Walaupun berbagai keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dicapai selama tahun 2021 lebih baik dari tahun 2021, namun penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui berbagai program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan tahun 2021 tetap masih memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Selain beberapa kegiatan tidak mencapai target yang diharapkan, walaupun dalam jumlah yang relatif sedikit, terdapat juga kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya Pemberlakuan masa PPKM darurat kesehatan sebagai respon Pemerintah terhadap pandemik COVID-19.

Adapun permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Medan pada Tahun Anggaran 2021 antara lain sebagai berikut :

- 1) Dari 2 program yang dilaksanakan pada tahun 2021 oleh Sekretariat DPRD kota Medan, kedua program tersebut belum mencapai hasil 100 % meskipun capaian output kedua program tersebut dapat dikategorikan sebagai **sangat memuaskan dan sangat baik**, namun terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan sebagaimana tercantum pada tabel-tabel capaian output/keluaran Program /kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021.
- 2) Persentase serapan anggaran pada tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2020 hanya mencapai 78,49%.
- 3) Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal
- 4) Masih adanya beberapa pegawai yang tidak mengerti dengan SOP pekerjaan dan tugas tugas pokok lainnya.
- 5) Kepemimpinan defenitif di Sekretariat DPRD Kota Medan yang vakum selama Tahun 2021 menyebabkan kurangnya koordinasi antar bagian sehingga dapat mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan.
- 6) Masih terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai.

2. Solusi

- 1) Melaksanakan evaluasi pada seluruh kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021 agar permasalahan yang serupa tidak terulang pada tahun-tahun berikutnya.
- 2) Penyelenggaraan *coaching clinic* dan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan kompetensi ASN Sekretariat DPRD Kota Medan. Antara lain meliputi bidang tata naskah dinas, keprotokolan, penatausahaan keuangan, SIPD, Pokok-pokok Pikiran DPRD, dll.
- 3) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi secara optimal dan dinamis untuk mempermudah pekerjaan.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2021 yang disusun berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan sarana pertanggungjawaban kinerja kepada publik selama satu tahun atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai. Substansi utama laporan ini juga berisi deskripsi dan capaian atas sasaran strategis Sekretariat DPRD yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, khususnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Secara umum, capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan pada Tahun 2021 yang dituangkan kedalam perjanjian kinerja, berdasarkan IKU adalah 100% (sangat memuaskan), meskipun target yang ditetapkan masih dalam skala menengah. Capaian kinerja ini masih sama dengan Tahun 2020. Namun seiring berjalannya pelaksanaan Renstra 2021-2026 target IKU Sekretariat DPRD Kota Medan akan terus ditingkatkan demi memastikan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Medan dapat di jalankan secara optimal. keberhasilan pencapaian target IKU tersebut tentunya juga di dukung oleh keberhasilan pelaksanaan Program dan kegiatan beserta sub-sub kegiatan yang ada pada Tahun 2021.

Capaian output/keluaran terhadap pelaksanaan Program kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diuraikan pada bab III dalam laporan ini menggambarkan hasil yang cukup memuaskan. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu sebesar 96% (sangat memuaskan), sementara capaian output/keluaran pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas DPRD sebesar 74% (sangat baik).

Adapun jika dilihat dari aspek serapan anggaran, kinerja Sekretariat DPRD mencapai 78,49% (sangat baik). Kinerja anggaran Tahun 2021 ini menunjukkan penurunan jika dibanding kinerja anggaran di Tahun 2020 yang mencapai 86,61%.

Dibalik keberhasilan pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021 tentu didukung oleh beberapa faktor diantaranya: pengembangan teknologi informasi yang terus berkelanjutan, perbaikan dan peremajaan sarana dan prasarana yang memadai dan terkini, pengembangan kompetensi sumber daya aparatur.

Untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan pada Tahun Anggaran 2022, beberapa hal berikut perlu dilakukan pembenahan, yaitu :

1. Pembenahan SDM Sekretariat DPRD Kota Medan

Permasalahan SDM menjadi kendala utama dalam pencapaian target kinerja. Untuk itu pembenahan SDM yang berkelanjutan terus dilaksanakan agar nanti nya tidak ada lagi SDM yang tidak memiliki kompetensi di bidang tugasnya masing-masing melalui *coaching clinic*, Diklat, Bimbingan Teknis dan lainnya.

2. Mengoptimalkan sistem informasi yang sudah ada

Sistem informasi yang ada sekarang ini dirasa cukup baik, namun perlu pengembangan lebih lanjut untuk menjawab perkembangan sesuai dengan kebutuhan pada masa-masa yang akan datang yang lebih kompleks dan dinamis.

3. Peningkatan koordinasi antara pegawai di bagian dengan pegawai yang ditempatkan di Alat Kelengkapan Dewan

Selain komunikasi dengan anggota DPRD, para penyelenggara layanan khususnya yang ada di bagian-bagian juga perlu meningkatkan koordinasi dengan para staf pendamping anggota DPRD yang ditempatkan di berbagai alat kelengkapan dewan. Hal ini mengingat setiap harinya para anggota DPRD lebih banyak berhubungan dan menyampaikan kebutuhannya melalui para staf pendamping tersebut. Sehingga para staf ini juga perlu diberikan pemahaman mengenai berbagai prosedur atau mekanisme layanan-layanan yang diselenggarakan oleh setiap bagian.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dibuat untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan ini dan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan.

Medan, 24 Febuari 2021



MUHAMMAD ALI SIPAHUTAR, S.S.T.P., M.A.P.
PEMBINA

NIP. 19790317 199912 1 001